

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana hasil uji t menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1.880 < t_{tabel} 1.992$. keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0). Artinya secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana hasil uji t menunjukkan nilai $0,062 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2.306 > t_{tabel} 1.992$. Keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0). Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $1.788 > F_{tabel} 3.10$. Keputusan yang

diambil yaitu menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0)

4. Hasil koefisien determinasi (R^2) 0.018. Nilai ini menerangkan bahwa 1,8% variabel Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2), sedangkan sisanya 98,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang terdapat diluar model ini.

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal – hal berikut :

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah.

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengangkat objek penelitian pada produk ekonomi lainnya, dengan jumlah variabel lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Abdul Hafidz Tanjung. (2009). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Bandung : Alfabeta.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dini Arwati dan Novita Hadiati. (2013). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat”. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013)*.
- Erlina dan Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

Saptaningsih Sumarmi. (2009). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta”.

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. (2003). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. *Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.*